

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yaitu suatu laporan yang dimana merupakan sumber informasi dan dapat dipergunakan oleh pihak eksternal untuk suatu kepentingan dengan entitas, lembaga maupun perusahaan (Rahman, dkk, 2019). Selama proses menyediakan informasi yang berbentuk laporan keuangan memiliki suatu tujuan yang dapat diperoleh dari laporan tersebut mengenai informasi suatu dalam laporan keuangan, baik performa maupun perkembangan pada status keuangan entitas pelapor yang akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil sebuah keputusan (Rahman, dkk, 2019).

Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi yang menjelaskan tentang keuangan suatu instansi atau perusahaan dalam masa periode akuntansi yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja perusahaan atau instansi tersebut. Kualitas laporan keuangan yang baik akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Pujanira & Taman, 2017). Hal yang disampaikan tersebut digunakan untuk sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan ekonomi digunakan bagi pihak yang sedang membutuhkan informasi untuk kepentingannya, hal itu biasanya digunakan untuk mempertimbangkan kerjasama pemerintah dengan *stakeholder* yang bersangkutan. Jika pemerintah menghasilkan kualitas laporan keuangan yang rendah maka itu akan menyebabkan *ineffisiensi* ketidak tepatan dalam pengelolaan keuangan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi disebabkan penggunaan alokasi jujur (Pujanira & Taman, 2017)

Menurut UU No 17 tahun 2003 yang menjelaskan tentang Keuangan Negara yang kemudian dilengkapi atau diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang kemudian disempurnakan dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mewajibkan pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan daerah tersebut akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapatkan penilai yang berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan memberikan opini setelah mereka memeriksa hasil laporan keuangan yang telah disusun oleh entitas pemerintah, BPK akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Kesuma dkk.,2017)

Terdapat empat jenis Opini yang akan di keluarkan oleh BPK terhadap hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan Menolak memberikan Opini atau Tidak memberikan Pendapat (TMP).

Pada penelitian ini dapat dilihat dari pemerintahan kota Palembang yang dimana pemerintahan kota Palembang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan melihat hasil dari BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan kota Palembang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Data Hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada tabel 3.1

**Tabel 1.1.**

**Perkembangan LKPD Kota Palembang**

No	Keterangan	Opini
1.	Tahun 2010	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Tahun 2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Tahun 2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6.	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7.	Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

<b>9</b>	Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>10</b>	Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber : Ikhtisar hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun Anggaran 2010-2019*

Dilihat dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa pemerintahan daerah kota Palembang sudah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik dalam proses penyusunannya dan pelaksanaannya. Pada saat ini kemajuan yang terjadi tidak dapat dihindari lagi, karena perkembangan seperti teknologi yang semakin canggih dengan hal itu menunjuk pemerintah dapat mengikuti perkembangan, agar bukan hanya perusahaan-perusahaan yang akan semakin berkembang mengikuti zaman pemerintah juga harus mengikuti perkembangan dan tetap berada dalam peraturan yang berlaku di pemerintah (Sukmadiansyah, 2015).

Pemerintah yang baik juga adalah bentuk keberhasilan yang dapat dilihat dalam menjalankan tugas untuk mengembangkan negara sesuai tujuan awal yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat (Sukmadiansyah, 2015). Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik maka pemerintah harus menghasilkan dan menyajikan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Tolak ukur apakah pemerintahan itu baik atau tidaknya, berkembang atau tidaknya dalam menjalankan roda pemerintahan itu dilihat dari hasil Laporan Keuangannya (Kesuma, dkk., 2017).

Laporan keuangan merupakan suatu catatan informasi yang menjelaskan tentang keuangan suatu instansi atau perusahaan dalam masa periode akuntansi yang dapat digunakan sebagai gambaran kinerja perusahaan atau instansi tersebut (Kesuma, dkk., 2017). Kualitas laporan keuangan yang baik akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Hal yang disampaikan tersebut digunakan untuk sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan ekonomi digunakan bagi pihak yang sedang membutuhkan informasi untuk kepentingannya, hal itu biasanya digunakan untuk mempertimbangkan kerjasama pemerintah dengan *stakeholder* yang bersangkutan (Djanegara, 2017).

Jika pemerintah menghasilkan kualitas laporan keuangan yang rendah maka itu akan menyebabkan *ineffisiensi* ketidak tepatan dalam pengelolaan keuangan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi disebabkan penggunaan alokasi modal yang tidak tepat (Djanegara, 2017). Indonesia merupakan pemerintahan yang demokratis oleh karena itu sebagai negara yang demokratis maka dalam pengelolaan keuangan negara kepada publik harus terbuka. Oleh karena itulah untuk menciptakan *Good Government* dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara (Djanegara, 2017).

Setiap pengelolaan keuangan di negara agar akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparasi) dan kewajaran dalam setiap proses pelaksanaannya. Selain itu dalam pelaporan keuangan juga diperlukannya responsibilitas dari masyarakat agar pemerintahan lebih seimbang antara masyarakat dan pemerintah (Rasinta, 2017). Jika dalam proses penyusunan laporan keuangan tidak adanya penerapan prinsip yang baik maka pemerintah itu dapat dikatakan kurang tersedianya informasi yang dapat digunakan untuk oleh stakeholder.

Masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang transparansi yang terjadi di pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah menjalankan prinsip yang harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaannya (Rasita, 2017).

Dalam Pemerintahan di Indonesia permasalahan Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Independensi merupakan persoalan yang akan terjadi dalam proses pelaksanaan pemerintahan daerah yang dimana saat ini selalu terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Pada pemerintahan Presiden Bapak Jokowi berusaha untuk lebih keras mempertunjukkan pemerintahan yang mana dibawah kepemimpinannya harus terbuka, jujur dan berkualitas (Rasita, 2017).

Akuntabilitas yang dapat kita artikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimana menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintah. Transparansi adalah wadah pemberian informasi yang jujur dan transparan terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan dari masyarakat yang memiliki hak untuk dapat mengetahui secara terbuka dan keseluruhan atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimana sudah dipercayakan

kepada pemerinth dan ketaatan pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut terhadap peraturan perundang-undangan (SAP No. 71 2010).

Responsibilitas adalah kemampuan sebuah organisasi yang dimana bertugas untuk mengatur bagaimana cara entitas memberikan pelayanan yang telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku atau prosedur yang telah ada. Responsibilitas merupakan kebijakan yang mengukur tingkat suatu pastisipasi dalam memberikan layanan selama proses pelaksanaan tugasnya. Responsibilitas dapat diartikan juga sebagai suatu ukuran yang akan menunjukkan sejauhmana entitas melaksanakan proses dalam memberikan pelayanan bagi publik yang akan dilakukan sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah berlaku untuk pelaksanaanya (Muslimah, 2016). dan yang terakhir independensi menurut Standar Profesional Akuntan Publik yaitu akuntan public tidak dapat dipengaruhi, tidak berpihak, berkewajiban untuk jujur dalam mengambil keputusan.

Dari penjelasan uraian ataupun teori yang telah dijalaskan maka penelitian kali ini melihat sudut pandang lain yaitu melihat sudut pandang dari penerapan tentang prinsip atau kebijakan yang secara sistem harus berjalan beriringan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik dengan menghasilkan kualitas laporan keuangan. Pada latar belakag di atas maka penulis mengambil judul untuk penelitian yaitu **“Pengaruh Penerapan *Good Government Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah tertera di atas, maka secara spesifik masalah penelitian ini dapat dirumuskan dengan kalimat pernyataan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Palembang?
2. Apakah transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Palembang?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Palembang?

4. Apakah independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Palembang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mengambil dasar dari matakuliah Akuntansi Sektor Publik yang mengambil topik tentang keuangan daerah, yang memiliki tujuan untuk mengkaaji pengaruh penerapan prinsip GGG terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Palembang. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh responsibilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan penulis diharapkan akan bisa memberi manfaat bagi penulis, lembaga, dan pemerintah daerah, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

#### **1.4.1. Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi keuangan.

#### **1.4.2. Bagi Lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/wi yang berminat membahas atau mengkasi ulang tentang penelitian ini.

#### **1.4.3. Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat sebagi bahan koreksi jika dalam

penelitian tersebut terjadi kesalahan dipemerintah dalam menyusun laporan keuangan dan juga sebagai daftar rujukan dan bantuan informasi dalam pengambilan keputusan strategis dalam menjalankan roda pemerintah daerah.

